



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2009

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/ 09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, maka alokasi penyediaan pupuk untuk Kota Mojokerto mengalami peningkatan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu merubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Mojokerto Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah ;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/SR.160/7/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
18. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009.

Pasal I

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Mojokerto Tahun 2009 Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 7/G diubah sebagai berikut :

- Lampiran Peraturan, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Juli 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 25 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 JULI 2009

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2009

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SUPER PHOSFAT	ZA	PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	833	34	142	25	59
2.	Perkebunan	-	48	271	-	-
3.	Peternakan	-	-	-	-	-
4.	Perikanan dan Budidaya	11	3	-	-	-
	JUMLAH	894	85	413	25	59

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK PADA KECAMATAN DI KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2009

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SUPER PHOSFAT	ZA	PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Magersari	524	53	265	15	38
2.	Prajuritkulon	370	32	148	10	21
	JUMLAH	894	85	413	25	59

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2009

UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	54	30	4	19	37	153	32	60	150	15	11	18	583
2.	Prajuritkulon	22	19	1	10	15	70	20	33	86	8	6	10	300
JUMLAH		76	49	5	29	52	223	52	93	236	23	17	28	883

SUPER PHOSFAT

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	3	4	-	1	1	3	3	2	3	-	-	3	23
2.	Prajuritkulon	2	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	2	11
JUMLAH		5	5	-	1	1	4	4	4	5	-	-	5	34

ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	4	11	2	4	3	13	5	2	12	17	9	12	94
2.	Prajuritkulon	2	5	-	2	2	6	2	1	6	9	6	6	47
JUMLAH		6	16	2	6	5	19	7	3	18	26	15	18	141

ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PHONSKA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO